

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan yang memiliki julukan “Bumi Ki Ageng” adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, dengan total seluas 1.975.865 km<sup>2</sup>. Kabupaten dengan ibukota Purwodadi ini berada di sisi timur Jawa Tengah dan terletak di antara 110°15’ BT - 111°25’ BT dan 7° LS - 7°30 LS. Di sisi barat, Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak, di utara dengan Kabupaten Kudus, Pati, dan Blora, timur dengan Kabupaten Blora, dan Selatan dengan Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang. Secara administratif, Kabupaten Grobogan menaungi total 19 kecamatan, 7 kelurahan, 280 desa, dan 1.457 dusun yang di antaranya adalah:

Tabel 2.1: Tabel Wilayah Administratif Kabupaten Grobogan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas Wilayah
1.	Brati	9	53	54,891 km <sup>2</sup>
2.	Gabus	14	87	165,365 km <sup>2</sup>
3.	Geyer	13	102	196,192 km <sup>2</sup>
4.	Godong	28	87	86,78 km <sup>2</sup>
5.	Grobogan	12	52	104,556 km <sup>2</sup>
6.	Gubug	21	62	71,119 km <sup>2</sup>
7.	Karangrayung	19	100	140,595 km <sup>2</sup>

8.	Kedungjati	12	76	130,342 km <sup>2</sup>
9.	Klambu	9	44	46,562 km <sup>2</sup>
10.	Kradenan	14	79	107,748 km <sup>2</sup>
11.	Ngaringan	12	78	116,72 km <sup>2</sup>
12.	Penawangan	20	71	74,177 km <sup>2</sup>
13.	Pulokulon	13	115	133,644 km <sup>2</sup>
14.	Purwodadi	17	104	77,656 km <sup>2</sup>
15.	Tanggunharjo	9	31	60,628 km <sup>2</sup>
16.	Tawangharjo	10	58	83,602 km <sup>2</sup>
17.	Tegowanu	18	54	51,67 km <sup>2</sup>
18.	Toroh	16	118	119,32 km <sup>2</sup>
19.	Wirosari	14	86	154,298 km <sup>2</sup>
<b>Jumlah:</b>		<b>280</b>	<b>1.457</b>	<b>1.975.865</b> <b>km<sup>2</sup></b>

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Grobogan, pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan mencapai 1.514.301 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 748 jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten Grobogan yang secara administratif terdesentralisasi ke dalam 19 kecamatan yang menaungi 280 desa ini menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan memiliki struktur pemerintahan tingkat kabupaten yang terorganisir.

## 2.2 Kependudukan Kabupaten Grobogan

Dilansir dari data yang dipublikasi oleh Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri, populasi penduduk Kabupaten Grobogan per tahun 2023 mencapai angka 1.514.301 jiwa yang tersebar di 19 kecamatan di seluruh Kabupaten Grobogan. Berikut tabel persebaran penduduk di Kabupaten Grobogan berdasarkan jenis kelamin di tiap kecamatan:

Tabel 2.2: Tabel Persebaran Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Kabupaten Grobogan

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Perempuan	Laki-laki	
1.	Brati	26.065	26.683	52.748
2.	Gabus	37.967	38.308	76.275
3.	Geyer	34.126	34.458	68.584
4.	Godong	44.902	45.013	89.915
5.	Grobogan	40.342	41.090	81.432
6.	Gubug	43.848	44.051	87.899
7.	Karangrayung	51.986	53.071	105.057
8.	Kedungjati	22.661	22.869	45.530
9.	Klambu	19.836	20.260	40.096
10.	Kradenan	42.769	43.279	86.048
11.	Ngaringan	35.410	36.655	72.065

12.	Penawangan	33.554	33.997	67.551
13.	Pulokulon	56.315	57.471	113.786
14.	Purwodadi	72.337	71.886	144.223
15.	Tanggunharjo	21.823	22.113	43.936
16.	Tawangharjo	30.063	30.793	60.856
17.	Tegowanu	29.936	30.203	60.139
18.	Toroh	60.652	60.675	121.327
19.	Wirosari	48.118	48.716	96.834
<b>Total</b>		<b>752.710</b>	<b>761.591</b>	<b>1.514.301</b>

Sumber: DKB dalam Profil Perkembangan Kependudukan Kab. Grobogan

Tahun 2023

Dari tabel tersebut terlihat bahwa antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Grobogan memiliki perbandingan jumlah yang cukup setara. Khususnya di Kecamatan Penawangan yang membawahi wilayah administrasi Desa Curut dan Wedoro, desa di mana komunitas buruh migran LRC-KJHAM berada.

### 2.3 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan

Dalam upaya meninjau tren ketenagakerjaan di suatu wilayah tidak mungkin terlepas dari komposisi penduduknya. Suplai tenaga kerja yang melimpah dapat dikelola oleh wilayah untuk mendorong poros perekonomian dan pembangunan daerah. Laporan tahunan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Grobogan di tahun 2023 menunjukkan bahwa

terdapat sejumlah 1.161.466 juta penduduk dari kelompok usia kerja, yang mana lebih dari setengah, yaitu 75,81% atau sebanyak 880.507 jiwa adalah angkatan kerja. Meskipun demikian, dari persentase tersebut, sebesar 3,05% atau sebanyak 26.855 orang penduduk merupakan pengangguran.

Tabel 2.3: Tabel Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Grobogan 2023

No.	Jenis Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	
1.	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>88,96</b>	<b>62,70</b>	<b>75,81</b>
	Bekerja	84,44	61,13	72,76
	Pengangguran	4,52	1,58	3,05
2.	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>11,04</b>	<b>37,30</b>	<b>24,19</b>
	Sekolah	4,77	6,31	5,54
	Mengurus Rumah Tangga	2,35	28,45	15,43
	Lainnya	3,92	2,54	3,23
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Sakernas Agustus 2023 dalam BPS Kabupaten Grobogan 2023

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa lapangan kerja didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki, sementara bukan angkatan kerja—yang khususnya berperan dalam mengurus rumah tangga—justru didominasi

perempuan dengan ketimpangan yang cukup tajam. Data yang tersaji pada tabel tersebut menunjukkan bahwa besarnya sumber daya manusia yang dimiliki tidak beriringan dengan peluang penyerapan tenaga kerja yang optimal dan inklusif di Kabupaten Grobogan.

Sedangkan berdasarkan data milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan di tahun 2023, 10 jenis pekerjaan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4: Tabel Karakteristik Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	181.054	160.656	341.710
2.	Mengurus Rumah Tangga	83	192.410	192.493
3.	Pelajar/Mahasiswa	125.001	99.437	224.474
4.	Pensiunan	4.777	2.737	7.514
5.	Pegawai Negeri Sipil	4.539	4.104	8.843
7.	Kepolisian RI	1.391	81	1.472
8.	Perdagangan	6.754	12.537	19.291
9.	Petani/Pekebun	186.270	143.162	329.432
10.	Peternak	306	255	561

Sumber: Profil Perkembangan Kependudukan Kab. Grobogan Tahun 2023

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa ada ketimpangan yang ekstrem antara laki-laki dan perempuan yang mengemban peran mengurus rumah tangga. Dari angka sebesar 192.493 orang penduduk, 192.410 di antaranya adalah perempuan, sementara laki-laki hanya sebanyak 83 orang. Angka ini menunjukkan bahwa 99,95% kerja perawatan dibebankan kepada perempuan.

#### **2.4 Gambaran Umum Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Grobogan**

Menilik dari kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan yang menunjukkan adanya ketimpangan ekstrem antara laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor formal—yang biasa disebut kerja produksi—dengan sektor informal atau yang umumnya ada di sektor reproduksi atau perawatan. Kondisi ketimpangan tersebut bukanlah statistik semata, namun membongkar struktur ketenagakerjaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Grobogan, Tingginya jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga ini memengaruhi pola migrasi kerja perempuan di Kabupaten Grobogan. Karena kondisi yang mendesain dan melembagakan perempuan dalam kerja-kerja informal ini, perempuan menjadi memiliki keterbatasan kapasitas pada kerja perawatan saja. Hal ini mempengaruhi kecenderungan sektor yang dipilih perempuan dalam “memilih” pekerjaan saat migrasi di luar negeri. Namun, kondisi ini tidak serta merta dilihat sebagai “pilihan” semata, namun harus ditinjau lebih dalam pengaruh struktur ketenagakerjaan di negara asal yang mendorong mereka bermigrasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis migrasi perempuan yang bekerja di sektor perawatan di luar negeri, contohnya *caregiver* (pengasuh) dan asisten rumah

tangga yang memiliki tingkat kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender lebih tinggi.

Data dari B2PMI menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan menempati posisi empat teratas sebagai wilayah penyalur buruh migran tertinggi di Jawa Tengah sebanyak 3.768 tenaga kerja migran di tahun 2023. Angka tersebut menyumbang signifikansi terhadap keseluruhan tren ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan. Namun, karena data ketenagakerjaan—utamanya yang berdasarkan jenis kelamin—di tingkat lokal belum tersedia dan terpilah secara spesifik, maka informasi kontekstual yang dimiliki oleh lembaga pendamping merupakan elemen penting dalam memahami fenomena buruh migran perempuan di Kabupaten Grobogan ini lebih dalam.

Sebagai lembaga pendamping, LRC-KJHAM memiliki dua komunitas buruh migran perempuan di Kabupaten Grobogan, khususnya di Desa Curut dan Wedoro. LRC-KJHAM terakhir kali melakukan pendokumentasian buruh migran perempuan di Kabupaten Grobogan, khususnya pada Komunitas Women Migrant Curut (WMC) pada tahun 2018, Adapun angka yang ditunjukkan dari data tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.5: Tabel Negara Destinasi Komunitas WMC Kabupaten Grobogan Tahun 2018

No.	Negara Destinasi	Jumlah
1.	Arab Saudi	16 orang
2.	Hongkong	5 orang
3.	Taiwan	4 orang

4.	Singapura	2 orang
5.	Malaysia	1 orang

Sumber: Laporan FPAR LRC-KJHAM “*Strengthening Sisterhood in Fighting for Women Migrant Workers’ Safe and Fair Migration in Curut Village of Central Java, Indonesia*”

Tabel tersebut menunjukkan bahwa negara-negara destinasi buruh migran anggota Komunitas Women Migrant Curut (WMC) yang dinaungi oleh LRC-KJHAM mayoritas adalah negara-negara di kawasan Asia. Terlepas dari ketiadaan pembaruan dari data yang dimiliki LRC-KJHAM ini, dokumentasi ini memberi gambaran kontekstual yang cukup terkait pola dan preferensi migrasi para buruh migran perempuan anggota komunitas di bawah LRC-KJHAM.

Meskipun demikian, keberlanjutan pendampingan LRC-KJHAM terhadap komunitasnya di Kabupaten Grobogan tercermin dari frekuensi LRC-KJHAM dalam mendampingi para anggota komunitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti diskusi, sosialisasi, hingga pelatihan-pelatihan yang umumnya hasil kerja sama dengan instansi pemerintahan.

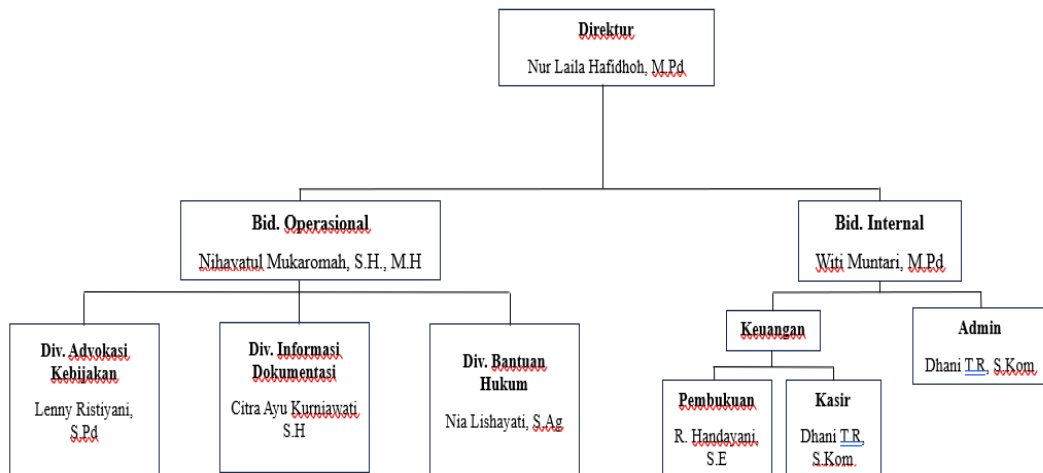
## 2.5 Keorganisasian LRC-KJHAM

Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada 24 Juli 1999. Pada mulanya, LRC-KJHAM merupakan sebuah divisi dikelola oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dengan

nomenklatur Kelompok Kerja Keadilan Jender dan HAM (K3JHAM). LRC-KJHAM berdiri sebagai lembaga independen merupakan respon terhadap tingginya tragedi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan pada masa Orde Baru, dan situasi tersebut mengisyaratkan untuk segera diadakannya lembaga non-pemerintah yang mampu mendampingi dan mengadvokasi isu-isu perempuan pada saat itu.

Sebagai LSM yang memiliki visi untuk menguatkan akses dan kontrol perempuan miskin, rentan, dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan gender, LRC-KJHAM mengorganisir kerjanya dengan pembagian secara struktural ke dalam dua bidang utama, yaitu Bidang Internal dan Bidang Operasional. Secara umum, Bidang Internal bertanggungjawab pada keuangan dan pembukuan organisasi, sedangkan Bidang Operasional pada 2023 menaungi tiga divisi, yaitu Bantuan Hukum, Informasi Dokumentasi, dan Advokasi Kebijakan.

Gambar 2.1: Struktur Kelembagaan LRC-KJHAM 2023

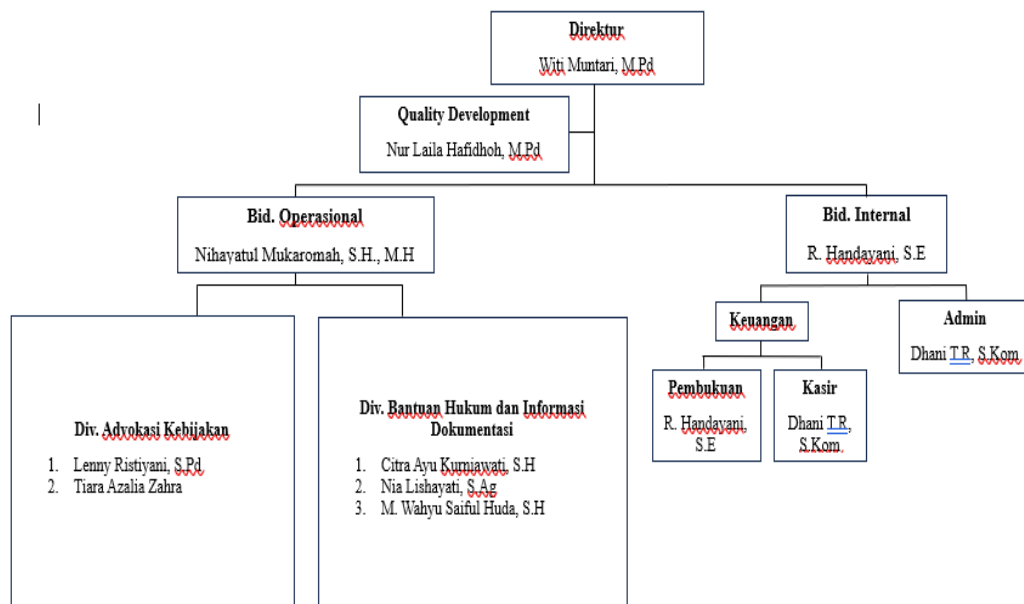


Sumber: Dokumen LRC-KJHAM

Pada Tahun 2023, LRC-KJHAM terbagi ke dalam dua bidang utama, yaitu Bidang Operasional dan Bidang Internal. Masing-masing bidang membawahi divisi-divisi lagi yang memungkinkan struktur fungsional berjalan dengan optimal. Di bawah Bidang Operasional terdapat tiga divisi, yaitu Divisi Advokasi Kebijakan yang berfokus pada upaya dan strategi advokasi ke masyarakat, pemerintah, dan jaringan masyarakat sipil lainnya seperti LSM, lalu ada Divisi Informasi Dokumentasi yang bertanggung jawab atas pengarsipan, manajemen sosial media, dan kampanye isu. Serta yang terakhir adalah Divisi Bantuan Hukum yang berfokus pada penyediaan pendampingan hukum untuk perempuan korban. Berlainan dengan Bidang Operasional yang kerja-kerjanya langsung bersinggungan dengan korban dan kasus, di sisi lain Bidang Internal lebih berorientasi pada pengelolaan internal organisasi agar LRC-KJHAM dapat beroperasi secara maksimal. Bidang Internal membawahi

dua divisi, yaitu Divisi Keuangan yang bertanggung jawab dalam pencatatan anggaran organisasi, serta Divisi Admin yang berfokus pada pengelolaan arsip dokumen dan administrasi LRC-KJHAM. Distribusi kerja ke dalam divisi-divisi ini memungkinkan LRC-KJHAM dalam memberikan pelayanan optimal sesuai dengan fokus dan basis kerja masing-masing divisi. Hal tersebut juga penting mengingat LRC-KJHAM sebagai organisasi masyarakat sipil yang erat kaitannya dengan kerja kolaboratif dan jaringan, baik dengan sesama LSM maupun masyarakat secara umum demi mencapai misi-misi LRC-KJHAM yang berfokus pada pemberian layanan hukum berperspektif gender yang mendorong pemenuhan hak-hak perempuan di Jawa Tengah.

Gambar 2.2: Struktur Kelembagaan LRC-KJHAM 2025



Sumber: Dokumen LRC-KJHAM

Sedangkan pada tahun 2025, bersamaan dengan pergantian direktur, struktur organisasi LRC-KJHAM juga mengalami perubahan. Perbedaan signifikan terlihat dari meleburnya Divisi Bantuan Hukum dengan Divisi Informasi Dokumentasi menjadi satu kesatuan akibat minimnya SDM jika tetap beroperasi secara terpisah. Selain itu, juga ditambahkan Bidang Quality Development yang berfungsi untuk menjamin mutu organisasi. Tidak hanya itu, khususnya di tahun 2025 hingga 2026 ini, di Divisi Advokasi Kebijakan dan Bantuan Hukum dibantu oleh masing-masing satu relawan. Adanya perubahan ini disesuaikan dengan arah organisasi yang dibawa oleh direktur baru dan dengan mempertimbangkan kondisi internal organisasi.

Selanjutnya, dalam mendampingi isu buruh migran di Kabupaten Grobogan, LRC-KJHAM membentuk dua komunitas dampingan yang beranggotakan buruh migran perempuan yang masih aktif bekerja di luar negeri dan mantan buruh migran perempuan yang telah kembali dan berdomisili di Kabupaten Grobogan. Dua komunitas tersebut ialah Women Migrant Curut (WMC) yang berada di Desa Curut dan Migrant Group Wedoro yang berada di Desa Wedoro, Kabupaten Grobogan. Dengan adanya pembentukan dan pembagian komunitas secara regional ini memudahkan proses pemberdayaan yang dilakukan LRC-KJHAM agar lebih terorganisasi.

Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap buruh migran perempuan, LRC-KJHAM menjalankan fungsi mereka sebagai organisasi masyarakat sipil khususnya melalui edukasi yang dikemas dalam bentuk

sosialisasi, diskusi, dan pelatihan. Umumnya, program-program ini berada di bawah fungsi Divisi Advokasi Kebijakan. Melalui pendekatan berbasis komunitas ini, kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan buruh migran perempuan sejak tahap pra, proses, dan pasca migrasi tentang hak-hak, aturan hukum, risiko kekerasan dan pelanggaran, dan lainnya. Secara garis besar, program-program ini bertujuan untuk mempersiapkan dan memperkuat kapasitas individu dalam menghadapi realita dan kerentanan di lapangan sebagai buruh migran perempuan.